

MODUL
PLURALITAS SEBAGAI MODAL DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL
MATERI : PLURALITAS SEBAGAI MODAL DALAM PEMBANGUNAN
NASIONAL



MOCH. ARIFIEN

PPG DALAM JABATAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2018

A. Pendahuluan

Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang beragam. Keberagaman tersebut muncul berbagai budaya yang ada, mulai dari suku, adat istiadat, agama dan juga etnis. Keberagaman tersebut dijadikan satu dalam semboyan yang dimiliki oleh Indonesia, yakni Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman itu pula sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi selama ini pembangunan yang dilakukan sering kali timbul masalah dari keberagaman tersebut. Pertikaian antar suku bangsa, agama dan ras masing banyak terjadi. Pemahaman mengenai keberagaman haruslah ditekankan sejak dini, sehingga dapat dijadikan modal yang kuat untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Modul ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Pendahuluan; Capaian pembelajaran; Materi; Rangkuman; Tugas, Tes dan Daftar Pustaka. Proses pembelajaran untuk materi kehidupan sosial, ekonomi, politik masa orde baru sampai reformasi yang sedang anda ikuti saat ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut ini:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam modul mulai tahap awal sampai akhir.
2. Lakukan kajian terhadap materi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam terlebih dahulu agar anda mendapat mendapat mengkonstruksi pengetahuan lebih detail.
3. Pelajari terlebih dahulu kegiatan belajar yang akan dilakukan.
4. Keberhasilan proses belajar Anda dalam mata diklat ini sangat bergantung kepada kesungguhan Anda dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat.
5. Bila anda menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ widiaswara pembimbing atau fasilitator yang mengajar modul ini.

Baiklah saudara pengguna modul, selamat belajar, semoga anda sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal anda bertugas dengan baik.

B. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran yang akan anda dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah anda dapat menjelaskan pluralitas sebagai modal dalam pembangunan nasional.

C. Sub Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini diharapkan anda dapat memiliki kemampuan untuk dapat Menjelaskan Pluralitas sebagai modal dalam pembangunan nasional

D. Materi

Pluralitas sebagai modal dalam pembangunan nasional

Silahkan simak video berikut ini mengenai kondisi pembangunan Indonesia

<https://bit.ly/2Ho5UcY>

Keanekaragaman Indonesia yang tersurat dalam semboyan Bineka Tunggal Ika, harusnya bisa dijadikan kekuatan dalam pembangunan. Jika setiap elemen bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan dapat bersinergi, maka proses pembangunan akan terakselerasi dengan sendirinya. Tidak boleh ada pengabaian terhadap kelompok-kelompok minoritas untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Hal ini sama saja dengan mengukur keberhasilan pembangunan (fisik) secara nasional dengan melihat (keberhasilan) pembangunan di pusat atau di Jakarta. Apabila hal itu dilakukan maka upaya tersebut merupakan pengingkaran terhadap kemajemukan sosio-kultural yang dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan (terbesar di dunia) dengan gugusan lebih dari 17.000 pulau-pulau besar dan kecil, Indonesia memiliki keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah yang tersebar wilayah Indonesia yang merupakan ciri dari sifat kemajemukan masyarakat Indonesia.

Terkait dengan keanekaragaman ras masyarakat Indonesia bangsa Indonesia purba telah ada sejak jaman glasial (jaman es). Kemudian datang gelombang migrasi dari utara dengan ciri-ciri Mongoloid. Oleh karenanya manusia Indonesia purba yang memiliki ciri-ciri sebagai ras Mongoloid diperkirakan datang dari utara atau dari daratan Cina di Propinsi Yunan. Gelombang migrasi dari utara ini terus berlanjut dan mereka yang bermigrasi ini membawa serta kebudayaan mereka sejak jaman batu sampai jaman logam dan mengembangkannya di tempat tinggal yang baru, termasuk teknologi bertani mulai pertanian lahan kering (ladang atau hortikultura) sampai dengan

pertanian sawah dengan teknologi pengairan. Mereka inilah yang akhirnya menjadi penduduk kepulauan Indonesia dengan ciri-ciri Mongoloid, Pada jaman kerajaan, karena adanya hubungan dagang dan penyebaran agama, pembauran dengan cara perkawinan dengan suku) bangsa lain menyebabkan terjadinya percampuran ras. Di Indonesia terdapat ras Mongoloid dan ras Kaukasoid Eropa di mana perbedaan ras ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ciri ras yang majemuk meskipun ciri-ciri yang menjadi batas perbedaan pemisah ras itu sendiri sudah kabur dan tidak jelas lagi karena adanya proses asimilasi yang telah berlangsung berabad-abad.

Silahkan simak video berikut ini mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia <https://bit.ly/2HU1hEf>

Bila merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang atau bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan melalui undang-undang, ini artinya bahwa bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang nenek moyangnya telah ada di Indonesia sejak dahulu kala yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan bangsa lain di sini, seperti peranakan Belanda, Cina, atau Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada NKRI dan disahkan melalui undang-undang. Selain itu ada juga keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, di mana setiap suku bangsa ini memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan suatu kesatuan dengan daerah tempat suku-suku bangsa itu berasal, hal ini terlihat dari *pertama* bahwa setiap suku bangsa itu memiliki budayanya sendiri dan akan mengembangkan budayanya serta akan mempertahankan budayanya dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada budayanya itu; *kedua*, bahwa kesadaran akan adanya kesamaan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya suku bangsa lain akan memupuk rasa kebersamaan antarsuku bangsa dan tetap pengembangan budaya suku bangsanya sendiri; *ketiga*, setiap suku bangsa itu akan membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan diterapkan atau diwujudkan dengan menggunakan bahasa daerah yang dimilikinya; *keempat*, membentuk ciri dan identitas kelompok sendiri, seperti bahasan, sistem kekerabatan, pakaian, sistem kepercayaan, bentuk rumah, dan lain sebagainya. agar diterima oleh kelompok lain.

Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme. Dua ciri lainnya ialah adanya cita-cita mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan kebhinekaan itu. Secara konstitusional, Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural. Faktanya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik berkaitan dengan soal-soal kebangsaan maupun keagamaan. Memerlukan tiga pilar utama untuk menuju masyarakat multikultural tersebut.

Pertama, ialah adanya para pengambil kebijakan publik yang adil yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan publik yang akan diambilnya. Kedua, ialah adanya para pemimpin agama yang berwawasan kebangsaan yang luas dan lebih mengedepankan agama sebagai nilai daripada agama institusional. Ketiga, ialah adanya masyarakat yang berpendidikan dan rasional dalam menyikapi keragaman keagamaan (religious market) dan perubahan sosial.

Terjadinya beberapa peristiwa SARA beberapa bulan lalu, misalnya kasus Sunni–Syiah di Sampang Madura bukan merupakan faktor agama atau ideologi tertentu melainkan oleh berbagai sebab yang saling terkait. Agama biasanya dibawa serta sebagai faktor legitimasi atau untuk menutupi konflik yang sesungguhnya. *Pertama*, krisis di berbagai bidang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, pada akhirnya selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintah yang terlanjur bertahun-tahun menunjukkan sikap kurang simpatik sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antarberbagai kelompok masyarakat. *Kedua*, akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok. *Ketiga*, kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar 4. Ilustrasi akibat dari konflik sara yang meluas

Sumber : <https://bit.ly/2Kb1iVg>

Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *bhinneka tunggal ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Dengan demikian multikulturalisme di Indonesia menyediakan wadah untuk penampakan “yang lain”. Kehadiran “yang lain” itu harus dipahami tanpa reduksi, atau distorsi. “Yang lain” itu harus tampil dalam soliditas dan keutuhannya masing-masing. Identitas adalah fakta yang eksotis dan dengan demikian mustahil digeneralisasi atau disimplifikasi. Perbedaan diterima sebagai sarana relasi, bukan ancaman desktruktif atau dijadikan alasan untuk menjalankan represi.

Sejarah perjuangan kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara lokal maupun nasional telah dicirikhaskan dengan kesadaran akan adanya serta komitmen akan penerimaan kemajemukan secara konsekuen dan konsisten.

Sumpah pemuda contohnya serta berbagai macam perjuangan untuk mendirikan dan mempertahankan Indonesia dari masa ke masa merupakan fakta sejarah nasional akan adanya serta komitmen untuk menerima dan mempertahankan kemajemukan masyarakat Indonesia. Begitu pula Pancasila dan UUD 1945 yang mencerminkan kesadaran, komitmen, pandangan hidup serta sikap hidup yang sama, hal tersebut merupakan bukti konstitusional nasional tentang pluralisme di Indonesia.

Berbagai peristiwa yang sempat menggejolak di sebagian wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir mengindikasikan telah terjadi pertentangan menyangkut berbagai kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dan dalam berbagai pertentangan itu, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik yang cukup berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Eskalasi pertentangan yang dilapisi baju SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang lebih menegangkan dan meresahkan. Dalam suasana seperti ini agama seringkali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam pergaulan pluralitas masyarakat. Masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinyalah yang paling benar, sedangkan pihak lain adalah yang salah. Persepsi bahwa perbedaan adalah merupakan sesuatu yang buruk, suatu hal yang menakutkan, sudah begitu rupa mendarah daging dalam jiwa umat beragama.

Akibat dari perseteruan tersebut adalah kesengsaraan semua pihak, yang bertikai maupun yang tidak mengetahui apa-apa. Pada dasarnya akibat dari konflik adalah kerugian yang menyeluruh di berbagai pihak. Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban dan harus menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Berbagai peristiwa itu telah memberi gangguan cukup serius terhadap tekad bersama untuk membangun bangsa Indonesia yang toleran dalam kehidupan antarpemeluk agama, toleran dalam kebudayaan, toleran dalam politik, dan toleran dalam aspek-aspek kehidupan lainnya.

Terlepas dari provokator dan lain sebagainya yang bisa menjadi sasaran kesalahan dalam setiap kekacauan, yang jelas umat beragama belum mempunyai kontrol emosi yang memadai sehingga begitu mudah terpancing untuk melakukan berbagai macam tindakan anarki. Umat beragama masih diliputi oleh rasa sentimen keagamaan dan fanatisme yang begitu kuat mengakar dalam dirinya. Padahal sentimen keagamaan dan fanatisme paling

tidak memberi andil atas terciptanya setiap adegan kerusuhan dan terjadinya konflik. Konflik yang mengatasnamakan agama pada umumnya disebabkan oleh penyimpangan arah proses sosial yang berkorelasi logis dengan bentuk-bentuk penyimpangan interaksi sosial antar umat beragama. Oleh karena itu, M. Imdadun Rahmat mengatakan bahwa fenomena demikian menunjukkan adanya keterputusan antara nilai-nilai keberagamaan yang selama ini dipahami dan perilaku sosial.

Dari fenomena-fenomena tersebut setidaknya dapat dijadikan vonis awal bahwa sampai saat ini, kesadaran pluralitas dalam beragama belum menyentuh sisi kesadaran paling dalam pada diri para pemeluk agama. Artinya, slogan-slogan bahwa agama mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, tidak menyukai tindakan kejahatan dalam bentuk apapun hanyalah omong kosong. Untuk itu seharusnya, menurut Abd A'la, nilai-nilai agama dilepaskan dari segala kepentingan pribadi dan kelompok serta agama tidak dijadikan alat untuk pencapaian tujuan tertentu. Untuk keberhasilan pembacaan kembali itu, nilai-nilai agama perlu dibaca sebagai sumber inspirasi dan bimbingan, serta rujukan utama bagi keseluruhan perilaku dan tindakan. Agama hendaknya dibaca sebagai agama.

Banyak hal yang mesti dibenahi, tetapi paling tidak upaya pemeliharaan atau pemulihan keharmonisan hubungan sosial dan kerukunan umat beragama yang sempat terusik akibat konflik SARA beberapa tahun belakangan, dipandang perlu melibatkan semua komponen masyarakat secara komprehensif dan integratif, baik pada arah nasional maupaun lokal. Pemecahan yang diasumsikan tentu saja berlandaskan pada dinamika obyektif masyarakat itu sendiri sesuai struktur yang berkembang secara aktual. Karena itu concern dan kerjasama instansi-instansi terkait serta pemberdayaan lembaga dan pemimpin agama dan masyarakat mutlak perlu dilakukan.

Secara sosiologis, Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang saling berbeda dan mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lain. Suatu bangsa yang terdiri dari berbagai etnis yang beragam, masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berlainan, keluarga tersebut terdiri atas individu-individu yang tidak sama, semuanya menunjukkan adanya perbedaan, keberagaman, dan keunikan namun tetap dalam satu persatuan. Perbedaan individu-individu melebur menjadi satu kesatuan keluarga, keragaman keluarga

melebur kedalam satu ikatan sosial, keanekaan suku terakum dalam satu bangsa dan dunia. Keseluruhan parsialitas tersebut adalah bagian dari pluralitas. Semakin beragamnya masyarakat dan budaya, sudah tentu setiap masing-masing individu masyarakat mempunyai keinginan yang berbeda-beda, dan hal ini dapat menimbulkan konflik diantara individu masyarakat tersebut, untuk itulah diperlukan paham pluralisme yang mengacu kepada pengertian toleransi untuk mempersatukan kebhinekaan suatu bangsa.

Tapi dari manakah dapat memulai penanaman kesadaran akan pluralisme tersebut? Memulai untuk memulihkan kebesaran hati pada pengakuan dan penghormatan atas keberbedaan yang sunatullah itu. Di tingkat struktur tentu saja umat beragama harus membenahi kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam berbangsa dan bernegara ini, sehingga lahir dan terwujud peraturan yang lebih baik. Sementara itu ditingkat kultur, menurut Abd A'la, para pemeluk agama dituntut menyikapi ajaran agamanya secara arif dan mau meletakkannya dalam kerangka pemahaman yang utuh, sehingga mencerminkan ajaran substansial dan universal agama mereka. Mulai pola pemahaman keagamaan semacam itu, mereka akan menemukan pada ajaran masing-masing nilai-nilai yang bernuansa kemanusiaan universal dan egaliterian, yang dapat melihat pemeluk agama yang berbeda sebagai mitra dalam kehidupan, dan bukan sebagai musuh yang harus dilenyapkan atau diperangi. Dalam pemahaman ajaran agama yang komprehensif, manusia dalam kemajemukan mampu membangun toleransi terhadap manusia yang lain dan selanjutnya mengembangkan komunikasi serta kerja sama yang kukuh dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sebuah kultur, maka pendekatan yang paling mungkin dan strategis adalah pendidikan.

Pendidikan merupakan agen perubahan kebudayaan (*cultural broker*) bagi masyarakat sekitar, mau atau tidak pendidikan Islam harus melakukan pembenahan. Hal ini merupakan tugas berat, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas masyarakat Indonesia, di sisi lain, juga menuntut sikap keberagaman yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, sikap-sikap itu –yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap

keberagaman yang inklusif dan toleran- bisa diekspresikan secara nyata oleh KH. Abdurrahman Wahid. Ia merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu mempeluangi keragaman sekaligus seorang manusia yang mampu “menikmati” keragaman itu.

KH. Abdurrahman Wahid salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain memberi dan menerima (*take and give*).

Konsep kerukunan dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah hal yang masih akan terus dipahami secara mendalam. Kerukunan berarti kondisi hidup yang jauh dari permusuhan, perselisihan, persengketaan serta saling membantu, saling menghormati dan saling kerja sama. Kerukunan merupakan sepakat dalam perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk mencari dan membina saling pengertian yang tulus ikhlas.

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan budayanya dengan setidaknya Lima teori dasar yakni :

- a. Teori Nilai: kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling mentaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat.

Kasus: bagaimana jika nilai-nilai dalam masyarakat tertentu mengajarkan kekerasan/konflik?

- b. Teori struktural: kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi dibawah tekanan. Dianut oleh orde baru.
- c. Teori idealis: kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara

keseluruhan. Kasus: Bagaimana peran ideologi pancasila atau ideologi yang bersumber dari agama dalam realita konflik di Indonesia?

- d. Teori resiprositas: kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap. Islam = halal bi halal, idul fitri. Kristen = pemberian hadiah natal dll. Berkaitan dengan teori resiprositas sosial Turner mengajukan pokok teori pertukaran: Manusia selalu mencari keuntungan dalam transaksi sosial Dalam transaksi sosial manusia memperhitungkan untung rugi Kesadaran atas alternatif bagi dirinya Adanya persaingan Relasi pertukaran berlangsung dalam semua konteks sosial bahkan dalam komoditas tak berwujud misalnya perasaan dan jasa.
- e. Teori interaksi: kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antar kelompok, etnis, agama dll dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Dalam pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap menjelaskan mengenai karakter masyarakat yang adil dan beradap adalah :

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia

Setiap suku bangsa akan sangat tergantung kepada eksistensi suku-suku bangsa lain sehingga hubungan dengan suku-suku bangsa lain itu dapat berkembang dan terjaga eksistensi budayanya. Atas hal ini, mereka dapat saling melengkapi, saling beradaptasi, dan dapat saling menerima nilai-nilai budaya dari suku-suku bangsa lainnya tanpa merubah identitas atau karakteristik budaya suku bangsa sendiri. Keanekaragaman budaya inilah yang dimiliki Indonesia, di satu pihak memang keragaman ini dapat mempererat integrasi di antara mereka

karena adanya persamaan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tetapi, di lain pihak, unsur-unsur yang bertentangan dapat pula mengakibatkan konflik di antara mereka. Satu kenyataan bahwa di kota-kota besar ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki berbagai bangsa menjadi pudar karena pengaruh industrial, dan perubahan itu sesungguhnya merupakan perubahan dari bentuk lama ke bentuk yang baru, yaitu dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, bila orientasi masyarakat itu awalnya pada bidang agraris. Perubahan itu memang tak dapat dihindarkan karena anggota-anggota suku-suku bangsa itu juga ikut berperan di dalam konsep perubahan dimaksud. Kemudian, seperti telah dijelaskan di atas, agama juga merupakan salah satu faktor terciptanya keragaman suku-suku bangsa di Indonesia. Bila menelusuri perkembangan sejarah maka perkembangan (masuknya) agama-agama di Indonesia maka perkembangan itu terlihat dari masuknya berbagai budaya asing, seperti budaya India, masuknya budaya Islam dengan budayanya, masuknya para misionaris Kristen dan Katolik, serta juga penyebaran agama-agama lain tidak lepas dari perkembangan budaya dan agama-agama di Indonesia.

Kemajemukan atau pluralitas masyarakat Indonesia yang terbentuk sejak jaman Hindia Belanda, ternyata masih terbawa sampai masa pasca kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, ia melihat bahwa pluralisme itu tidak lagi bersifat vertikal, karena adanya perubahan situasi politik yang juga telah berubah. Dalam pandangannya itu, kekuatan politik kolonial yang begitu *concern* dalam menjaga *status-quo* pluralitas masyarakat Indonesia atas dasar perbedaan, aksesibilitas, dan kontrol atas kekuasaan politik dan ekonomi, telah berantakan bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Sejak kemerdekaan Indonesia itulah, negara dan bangsa Indonesia lalu dihadapkan pada pluralisme Horizontal. Di mana atas hal ini mengelompokkan masyarakat Indonesia lebih banyak diikat oleh ikatan-ikatan primordial, seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, agama, dan suku bangsa. Ikatan primordial inilah, begitu Radjab (1966) menjelaskan, yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah mengelompokkan masyarakat Indonesia itu tumbuh dan berkembang baik dalam organisasi-organisasi sosial formal maupun informal, dalam pemerintahan, dalam organisasi-organisasi ekonomi, maupun dalam organisasi-organisasi politik. Menurut Patji (2001, dalam *Indonesia Menapak Abad 21*) yang harus dipahami dari karakteristik pluralitas masyarakat Indonesia

adalah keanekaragaman suku-suku bangsa dan kebudayaan yang ada. Konsep ini kemudian juga mencakup keragaman stratifikasi sosial, struktur sosial, kelas atau golongan sosial, cara bertahan hidup, orientasi nilai-nilai sosial budaya, konsep-konsep dan praktek-praktek menegakkan hukum, norma-norma dan kaidah-kaidah moral, partisipasi masyarakat di bidang politik, dsb.

Oleh karenanya, kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan dilaksanakan atas dasar keadilan. Artinya, pembangunan itu tidak saja mempertimbangkan besarnya jumlah penduduk suatu wilayah melainkan juga harus memperhitungkan potensi alam yang dimiliki, tingkat kesejahteraan hidup warganya, akses terhadap sumber daya, dan sebagainya. Semua keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu, memang terkait dengan konsep integrasi dan konflik, di mana keragaman itu, menurut Geertz (1963), merupakan kendala yang sangat krusial dalam mencapai integrasi nasional. Oleh karenanya, konflik haruslah diarahkan dan diupayakan menjadi suatu perbedaan yang wajar karena pada dasarnya masyarakat itu memiliki konsep gagasan masing-masing mengenai pembangunan dan modernisasi.



Gambar 5. Pembangunan yang kurang merata

Sumber : <https://bit.ly/2HJEQUd>

Konflik yang terjadi di dalam masyarakat majemuk, menurut Mutakin dan Pasya (2003), tidak harus dianggap sebagai suatu pertentangan yang mengarah kepada perpecahan melainkan harus dianggap sebagai perbedaan-perbedaan yang muncul sebagai akibat adanya ikatan primordial. Atas hal ini

harus dicari titik temu dan solusi, sehingga pluralitas itu dapat digunakan untuk mewujudkan suatu integrasi. Dengan integrasi itu pula haruslah dibuat konsensus bersama mengenai norma-norma, kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial di mana seluruh norma, kaidah, dan nilai-nilai sosial itu akan tetap bertahan eksistensinya di dalam masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar semua kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan dikesampingkan sementara dan mendahulukan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu diperhatikan mengenai sumber-sumber konflik, harus digali pula potensi untuk menanamkan rasa toleransi, juga melihat bagaimana pandangan anggota dari suku-suku bangsa itu terhadap sesama suku bangsanya dan terhadap suku bangsa serta terhadap golongan lain terkait dengan (konsep) integrasi, Dengan melihat itu semua maka potensi konflik dapat dieliminasi semaksimal mungkin dan potensi toleransi dapat dikembangkan seluas mungkin.

Semua kejadian, konflik dan kekerasan, itu seolah muncul dengan begitu saja, secara spontan, tanpa antisipasi yang jelas. Sepertinya semua timbul di luar perhitungan. Barangkali inilah dampak dari proses modernisasi dan pembangunan yang dijalankan selama ini. Perbedaan etnik, kesenjangan sosial ekonomi, pemilahan budaya, atau juga perbedaan pandangan hidup dan agama yang dianut, termasuk perbedaan pemahaman atau persepsi atas konsep-konsep dan pelaksanaan pembangunan, kesemuanya memungkinkan timbulnya berbagai konflik yang memicu kekerasan dan menelan banyak korban. Ada yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah atau mereka yang perkompeten dalam urusan ini, terkait dengan proses pembangunan yang merupakan permasalahan yang sangat serius, yaitu *pertama* adanya ketimpangan atau ketidak seimbangan antara pembangunan yang dilakukan di Jawa dan di luar Jawa. *Kedua*, adanya kesenjangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). *Ketiga*, tidak terjadinya transformasi ekonomi di beberapa daerah sehingga pembangunan ekonomi menjadi tidak seimbang di semua daerah. *Keempat*, kurangnya keterkaitan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, misalnya Propinsi A membangun jalan raya propinsi sering kali tidak diikuti oleh propinsi B dalam membangun jalan raya yang dapat menghubungkan antara kedua propinsi itu. *Kelima*, kebijakan dalam pengaturan struktur kependudukan yang kurang

berpijak pada potensi kebudayaan dan kewilayahan dari wilayah tertentu. *Keenam*, masih lemahnya prasarana dasar pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. Timbulnya konflik dan permasalahan yang diuraikan di atas memang tidak dapat dihubungkan secara langsung sebagai akibat eksistensi pluralitas di Indonesia. Karena hal itu juga sangat berhubungan erat dengan pengelolaan negara dan bangsa oleh para penguasa. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia seolah hanya slogan semata tanpa implementasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali kurangnya pemahaman mengenai demokrasi yang dilandasi oleh kenyataan pluralitas yang dimiliki masyarakat bangsa Indonesia itu menyebabkan timbulnya upaya-upaya pemaksaan untuk membentuk keseragaman demi menciptakan integrasi. Tetapi kemudian integrasi itu menjadi semu adanya karena demokrasi yang diterapkan bukan mengakar pada keragaman yang dimiliki. Terlebih lagi saat ini di demokrasi di Indonesia dilakukan sistem pemilihan umum secara langsung pada tiap-tiap daerah. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut juga selama ini banyak memunculkan konflik yang mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal tersebut sebenarnya mencerminkan jika bangsa kita belum cukup dewasa dalam melaksanakan proses demokrasi, perlu adanya edukasi agar demokrasi justru tidak menimbulkan perpecahan.



Gambar 6. Prediksi daerah rawan konflik pilkada

Sumber : <https://bit.ly/2HMNX72>

Demokrasi dan integrasi, oleh karenanya, menjadi gambaran upaya-upaya dalam meletakkan kepentingan golongan tertentu demi memuluskan

kiprah mereka di kancah politik. Sentralisasi, yang diterapkan pada pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru, seolah merupakan pelecehan terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal-etnik, dan di sisi lain justru makin menancapkan cengkeraman pemerintah pusat dalam 'menguasai' (pemerintah daerah). Hegemoni inilah yang merupakan salah satu bibit disintegrasi bangsa karena primordialisme menjadi sangat kental dengan bibit disintegrasi bagi masyarakat bangsa Indonesia yang beragam.

Pada era reformasi sudah dilakukan otonomi daerah. Yang itu artinya daerah dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya demi kepentingan bersama. Sehingga konsepnya semua yang membangun adalah daerah sendiri yang memang benar-benar mengetahui potensi yang dimilikinya, sehingga pembangunan dapat lebih dapat merata dan tercapai pada tujuan yang dicita-citakan.